

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan selama ini, khususnya dalam interval waktu tahun terakhir (tahun 2023) dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2023 disusun sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan kegiatan tahun selanjutnya.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALINAU
KEPALA,**

Muliyadi, SH.,M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19641124 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	5
b. Gambaran Umum	6
c. Organisasi	6
d. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
e. Maksud dan Tujuan	10
f. Sumber Daya Manusia	11
g. Sistematika Penyajian	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026	13
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	15
2. Indikator Kinerja.....	17
3. Program.....	19
B. Rencana Kerja Tahunan.....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja	32
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran I	32
b. Realisasi Anggaran Sasaran I.....	39
c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran II	32
d. Realisasi Anggaran Sasaran II.....	47
e. Analisis Capaian Kinerja Sasaran III	48
f. Realisasi Anggaran Sasaran III.....	52

BAB IV PENUTUP	54
----------------------	----

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Struktur Organisasi.....	7
1.2	Strategic Issue.....	8
1.3	Jumlah Aparatur Kesbangpol	11
1.4	Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan.....	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	17
2.2	IKU OPD	18
2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2023	20
2.4	RKT.....	25
2.5	Renja OPD	26
2.6	Perjanjian Kinerja	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN I

3.1	Capaian Kinerja.....	32
3.2	Pencapaian Sasaran	33
3.3	Perbandingan	34
3.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan.....	37
3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran	39
3.6	Target dan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Tahun 2023	40

SASARAN II

3.7	Capaian Kinerja.....	41
3.8	Perbandingan	42
3.9	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan.....	45
3.10	Alokasi Anggaran	47
3.11	Target dan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Tahun 2023	47

SASARAN III

3.12	Pencapaian Sasaran	48
3.13	Perbandingan	49
3.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	51
3.15	Alokasi Anggaran	52
3.16	Target dan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Tahun 2023	53

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan rencana strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun laporan kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2023 sesuai program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2023 sehingga laporan kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat urusan pemerintah.

Untuk mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau yang telah dianggarkan melalui APBD tahun Anggaran 2023 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

b. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e) Pelaksana administrasi badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) bidang, yaitu; Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik, Bidang Kewaspadaan Nasional, serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

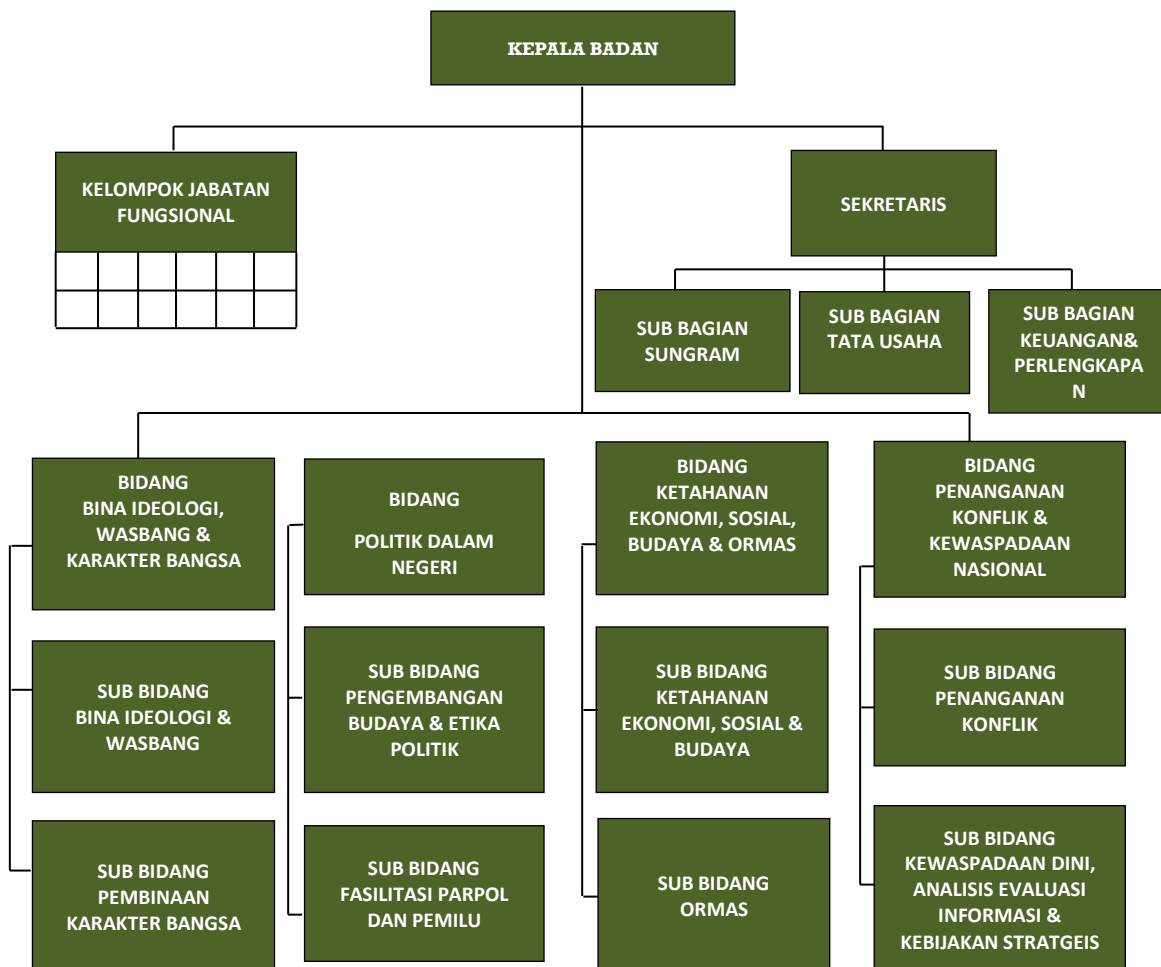
Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi
 - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
3. Bidang Politik dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
 - a) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
- Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 - Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Adapun Struktur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Tabel. 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL KAB. MALINAU



d. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Berikut adalah permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan kesbangpol Kabupaten Malinau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan hasil analisa kondisi internal maupun eksternal.

Tabel 1.2
Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Malinau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa	Mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	• Masih adanya bibit intoleransi yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan • Masih adanya sikap lebih mementingkan kepentingan golongan maupun suku masing-masing • Lunturnya rasa cinta tanah air • Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme • Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar • Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global • Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dan generasi muda • Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
		Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat	• Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah • Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah • Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial • Belum terkelolanya aset daerah dengan baik • Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi • Kurangnya pemahaman ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Masih kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan

			• Belum optimalnya akses kesehatan dan pendidikan yang merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktifitas kerja masyarakat • Belum meratanya pembangunan di daerah perkotaan dan daerah terpencil • Ketakutan investor akan ketidakpastian iklim investasi akibat ditunggangi kepentingan politik • Sulitnya memasarkan hasil pertanian dan perkebunan khususnya daerah perbatasan dan pedalaman akibat akses transportasi yang masih kurang memadai
		Terdapat kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan belum mandiri dan belum terdaftar	• Pembinaan Ormas belum optimal • Kurangnya Kesadaran Ormas untuk Mendaftar
		Potensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial dimasyarakat	• Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan • Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat • Masih maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba • Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini • Kesenjangan sosial • Kurangnya lapangan kerja
2.	Rendahnya kualitas politik dan demokrasi	Pemahaman budaya politik dan nilai-nilai berdemokrasi masih kurang	• Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi • Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi • Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda

			reformasi • Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi • Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat • Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis • Masih rentan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilu • Masih adanya praktek politik uang dalam pemilu • Netralitas yang masih menjadi dilema sebagian masyarakat
--	--	--	---

e. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Tahun 2023 mencakup hal hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 30 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 (satu) tenaga honorer yang tersebar di sejumlah unit kerja yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Tabel. 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	2
2.	Golongan IV/a	6
3.	Golongan III/d	8
4.	Golongan III/c	2
5.	Golongan III/b	1
6.	Golongan III/a	6
7.	Golongan II/d	2
8.	Golongan II/c	1
9.	Golongan II/b	1
10.	Golongan I/c	1
Jumlah		30

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Malinau, 2023

Berdasarkan golongan/ruangnya, ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau yang memiliki golongan III/d yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, kemudian golongan IV/a sebanyak 6 (enam) orang, golongan III/a sebanyak 6 (enam) orang, golongan III/c sebanyak 2 (dua) orang, golongan III/b sebanyak 1 (satu) orang, golongan II/c sebanyak 1 (satu) orang, golongan II/b sebanyak 1 (satu) orang dan golongan I/c sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel. 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-2 (S-2)	8
2.	Strata-1 (S-1)	15
3.	SLTA	6
4.	SD	1
Jumlah		30

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Malinau, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang, kemudian SLTA sebanyak 6 (enam) orang, kemudian Magister (S-2) sebanyak 8 (delapan) dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 (satu) orang.

g. Sistematika Penyajian

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau maka disusun dengan tata urut sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum
- c. Organisasi
- d. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- e. Maksud dan Tujuan
- f. Sumber Daya Manusia
- g. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 4. Indikator Kinerja
 5. Strategi dan Arah Kebijakan
 6. Program
- B. Rencana Kerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan di akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026. Berbeda dengan Renstra tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tidak lagi merumuskan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau.

OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”

Pernyataan Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 tersebut memiliki makna sebagai berikut :

a. Kabupaten Malinau yang Mandiri :

Pertama, terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

Kedua, terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada sektor pangan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia.

Ketiga, terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata daerah dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah;

b. Kabupaten Malinau yang Damai :

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Di tengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dalam saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.

c. Kabupaten Malinau yang Sejahtera :

Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah, serta meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

d. Pemerintahan yang Profesional :

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya sistem pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*), efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan responsive terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan publik yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan.

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 untuk mencapai visi tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan tujuan yaitu Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun sasaran dari Misi ke-1 yang terkait dengan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau yaitu Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat, dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kerukunan Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau untuk jangka menengah pada tahun 2021 - 2026 yaitu : **Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Dalam Bingkai NKRI**

Sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II). yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas;
2. Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Harmonis, dan Berkeadilan Dalam Bingkai NKRI		Persentase stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	0%	0%	0%	0%	0%
		Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	75%	78%	81%	84%	87%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	68	70	72	74	76

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Dalam Bingkai NKRI	Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	<i>Jumlah konflik agama di Masyarakat yang ditangani</i> <i>Jumlah konflik agama yang terjadi x 100%</i>	Bidang bina ideologi, wasbang & karakter bangsa, Bidang ketahanan ekososbud & ormas, Bidang penanganan konflik & wasnas	Kabid Penanganan Konflik
		Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik</i> <i>Jumlah pemilih di wilayah dikpol x 100%</i>	Bidang Poldagri	Kabid Poldagri
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	<i>Hasil evaluasi/penilaian SAKIP tahun berjalan</i>	Inspektorat	Sekretaris

3. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Adapun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2023	
			Target	Anggaran
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 (Nilai)	4.987.571.727,00
	<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	4.638.571.727,00
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.638.571.727,00
	<i>Administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	349.000.000,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	65.000.000
3	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	55.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	58.000.000
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	171.000.000
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami ideology pancasila dan karakter kebangsaan	100%	394.990.000,00
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>Pembentukan forum pembauran tingkat Kabupaten</i>	1 (Tim)	394.990.000,00
1	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideology, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di bidang ideology, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	80 Orang	394.990.000,00

III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik untuk parpol yang ada di Kabupaten Malinau	100%	19.999.996.000
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</i>	<i>Persentase parpol yang mendapatkan pendidikan politik</i>	<i>100%</i>	<i>19.999.996.000</i>
1	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100 Orang	6.300.000.000
2	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100 Orang	199.996.000
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	2 Laporan	13.500.000.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama	100%	300.000.000
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan</i>	<i>Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB)</i>	<i>1 Forum</i>	<i>300.000.000</i>

	pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			
1	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	240 Orang	300.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat	100%	1.449.998.800
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Terlaksanananya kerjasama OPD dengan instansi vertikal dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	2 Kegiatan	1.449.998.800
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Orang	700.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	100.000.000

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan	649.998.800
					27.132.556.527

A. Rencana Kerja Tahunan

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	%	0
2	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Politik	%	80
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	70

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		
		K		Rp
1	2	3		4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70	Nilai	4.987.571.727,00
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%	4.638.571.727,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	4.638.571.727,00
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	%	349.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	65.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	55.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	58.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	171.000.000,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	394.990.000,00
	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	1	Tim	394.990.000,00

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	80	Orang	394.990.000,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%	19.999.996.000,00
	<i>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</i>	100	%	19.999.996.000,00
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100	Orang	6.300.000.000,00
	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100	Orang	199.996.000,00
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	2	Laporan	13.500.000.000,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	100	%	300.000.000,00
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	1	Forum	300.000.000,00

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	240	Orang	300.000.000,00
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	%	1.449.998.800,00
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	2	<i>Instansi Vertikal</i>	<i>1.449.998.800,00</i>
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15	Orang	700.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	Orang	100.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan	649.998.800,00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Malinau kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian *output* tetapi termasuk kinerja *outcome* kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang telah disesuaikan sebagaimana penyesuaian Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	0 %
2	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	78 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	70

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	394.990.000	APBD-P
2.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	19.999.996.000	APBD-P
3.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	300.000.000	APBD
4.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.449.998.800	APBD-P
JUMLAH		22.144.984.800	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis.

Berikut capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Malinau
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	%	0%	0%	100%
Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	%	78 %	80%	102,56%

Sumber : Badan Kesbangpol

B. Analisis Capaian Kinerja

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang, selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Salah satu poin penting terkait isu-isu strategis kerawanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, daerah rawan konflik ada di daerah yang merupakan pusat pemerintahan, dan daerah perebutan suara karena jumlah pemilihnya yang lebih besar dari daerah lain. Pemicu terjadinya konflik antara lain, ujaran kebencian dengan isu SARA dan politik uang.

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan dan analisis lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal salah satu isu strategis Kabupaten Malinau Tahun 2024 yaitu Keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dan Menjamin Kerukunan Beragama. Dan untuk mengantisipasi isu-isu tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengoptimalkan komponen yang dimiliki bekerja sama dengan Institusi terkait dan Kelompok Masyarakat yang berkomitmen terhadap Intoleransi berbangsa, beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Malinau untuk melakukan langkah antisipasi kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yakni :

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Malinau bersama aparat keamanan, aparat intelejen dan pihak terkait lainnya.
2. Bersama KPU dan Bawaslu menjalin sinergi dengan semua pihak dalam menangani potensi kerawanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Malinau, terutama dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Malinau 2024, serta mengajak masyarakat untuk menolak isu *hoax*, *black campaign* dan *money politic*.
3. Bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan para tokoh lainnya agar senantiasa menyampaikan himbauan yang menyejukkan dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan mengajak masyarakat tidak mudah percaya kepada isu atau berita yang tidak benar.

Peran serta Tim Terpadu kewapadaan Dini Pemerintah Daerah juga sangat membantu dalam memberikan informasi yang penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah pencegahan timbulnya potensi konflik di masyarakat.

Berikut akan di uraikan masing-masing sasaran strategis serta pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

1. Sasaran 1 " Meningkatkan toleransi keberagaman Masyarakat terhadap Pluralitas

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran
Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	0%	0%	100%

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase menurunnya konflik antar umat beragama yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah konflik agama di Masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik agama yang terjadi}} \times 100\%$$

- a. Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa pada sasaran pertama **Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas**, indikator kinerja yaitu **Persentase menurunnya konflik antar umat beragama** target kinerja yang ingin dicapai adalah 0 (nol) persen atau tidak terjadinya konflik, baik yang berpotensi menjadi konflik sosial maupun konflik agama serta suku. Pada tahun 2023 realisasi dari **Persentase menurunnya konflik antar umat beragama** dapat tercapai yakni 0% dengan capaian kinerja 100%.

a. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun.....	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	%	0 (tidak ada konflik)	0 (tidak ada konflik)	0 (tidak ada konflik)	100%	100%

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 yaitu realisasi Persentase menurunnya konflik antar umat beragama tahun 2023 dan 2 (dua) tahun sebelumnya tetap sama atau sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kondusifitas yang terus terjaga antar umat beragama

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan
--

Dari tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau.

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2023, tampak bahwa adanya keharmonisan antar umat beragama yang terus terbina dan terjaga, hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang cukup memuaskan dan karena ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberi pemahaman kepada Masyarakat untuk menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama sehingga terwujudnya kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan kestabilan politik. Adapun kegiatan penunjang untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik baik konflik sosial maupun konflik agama serta suku yaitu :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama di Kab. Malinau
2. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
3. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Kab. Malinau
4. Fasilitasi Tim Forkopimda Kab. Malinau
5. Sosialisasi Terkait P4GN bagi tokoh Masyarakat, agama, Kepala Desa, RT yang diharapkan agar nantinya mereka yang meneruskan di lingkungan Masyarakat
6. Sosialisasi bina ideologi bagi kaum muda dan remaja yang dilakukan ke sekolah-sekolah untuk membentuk karakter yang berwawasan Pancasila
7. Pemberian bantuan hibah kepada veteran

Faktor-faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Dialog antar umat beragama masih dijalankan pada kelompok terbatas
2. Terbatasnya kemampuan SDM dalam melakukan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah
3. Pelaksanaan sosialisasi P4GN, bina ideologi dan karakter bangsa masih terbatas untuk wilayah perkotaan dan belum menjangkau secara keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Malinau
4. Informasi dan akurasi data anggota Veteran di Seluruh Kabupaten Malinau belum tercatat dalam sebuah pendataan yang komplit

Adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah bersama dengan FKUB bekerjasama dalam **membina kerukunan** antar **umat beragama**
2. Pengajuan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi P4GN, bina ideologi dan karakter kebangsaan untuk daerah pedalaman dan perbatasan;
3. Meningkatkan SDM personil ASN Kesbangpol dalam pelatihan deteksi dini dan pencegahan dini untuk menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan **dini** untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.
4. Pemutakhiran data Veteran yang ada di Kabupaten Malinau

c. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja **Menurunnya konflik antar umat beragama** sebesar Rp. 1.925.493.255 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.114.988.800 atau capaian realisasi sebesar 82,19% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,10%. Dari data tersebut tampak kesenjangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, hal ini disebabkan dalam APBD-Perubahan terdapat satu kegiatan yaitu pemberian bantuan hibah bagi Veteran yang dilaksanakan oleh OPD lain namun secara ketentuan dan regulasinya berada di Kesbangpol yang mengakibatkan sampai batas waktu yang ditentukan pihak penyelenggara belum melengkapi dokumen pertanggung jawaban yang diperlukan sehingga mengakibatkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 219.495.545.000 atau sebesar 16,91%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan Peningkatan Kapasitas aparatur Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan deteksi

dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya. Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparaturnya Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini ini merupakan entry-point untuk membangun intelijen pemerintah daerah yang handal serta mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Dimana ASN dituntut untuk dapat menguasai Kompetensi Teknis, Managerial dan Sosiokultural serta Kompetensi Pemerintahan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan sub kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Menurunnya konflik antar umat beragama	100 %	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan <i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi <i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	82,19

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial <i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i> Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
--	--	--	---	--

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Dari tabel diatas tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5(lima) sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan

pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 1. Rakor Pengamanan dan Pemantauan Pemilu Tahun 2024



Gambar 2. Sosialisasi Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

C. Realisasi Anggaran

Anggaran 3 (tiga) bidang untuk meningkatkan toleransi keberagaman Masyarakat terhadap pluralitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya toleransi keberagaman Masyarakat terhadap	2.114.988.800	1.925.493.255	82,19%

	pluralitas			
--	------------	--	--	--

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja untuk meningkatkan toleransi keberagaman Masyarakat terhadap pluralitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar Rp. 2.114.988.800 yang telah terealisasi sebesar Rp. 1.925.493.255 atau tercapai 82,19%. Anggaran tersebut terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu Belanja Operasi. Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	394.990.000	232.095.000	58,76
	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>394.990.000</i>	<i>232.095.000</i>	<i>58,76</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	394.990.000	232.095.000	58,76
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	300.000.000	268.684.555	89,56
	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	<i>300.000.000</i>	<i>268.684.555</i>	<i>89,56</i>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000	268.684.555	89,56
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.449.998.800	1.424.713.700	98,26

	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	1.449.998.800	1.424.713.700	98,26
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700.000.000	700.000.000	100
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000	92.467.900	92,47
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	649.998.800	632.245.800	97,27

2. Sasaran 2 “ Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran
Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	78%	80%	102,56%

Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				
---	--	--	--	--

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik}}{\text{Jumlah Pemilih di wilayah Dikpol}} \times 100\%$$

- a. Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa pada sasaran kedua **Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**, indikator kinerja yaitu **Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Politik** target kinerja yang ingin dicapai adalah 78 (tujuh puluh delapan) persen dilihat dari partisipasi Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik dengan perbandingannya jumlah pemilih di wilayah Pendidikan Politik tersebut. Pada tahun 2023 realisasi dari **Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Politik** dapat tercapai yakni 80% bahkan melebihi dari target yang direncanakan dengan capaian kinerja 102,56%.

a. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun.....	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	%	80	Tidak dilaksanakan	75	-	93,75

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Dikarenakan pendidikan politik baru dilaksanakan dalam APBD-P Tahun 2022, jadi tidak ada perbandingan antar tahun sebelumnya mengingat tahun 2021 adalah tahun peralihan dari Renstra 2016-2021. Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 yaitu realisasi Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Politik tahun 2023 dan tahun sebelumnya mengalami peningkatan atau sebesar 93,75%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk lebih mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan
--

Dari tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau.

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2023, tampak bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang damai dan saling menghargai perbedaan sehingga terwujudnya keamanan dan kestabilan politik. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan tersebut yaitu :

1. Bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan Parpol dalam mensosialisasikan Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu kepada Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada mendatang.
2. Mensosialisasikan Pemilu melalui media cetak (baleho, spanduk dan banner) dengan logo dan ajakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.
3. Mengintensifkan edukasi publik dalam menyikapi proses dan hasil Pemilu dan Pilkada.

Faktor-faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana edukasi lewat media sosial belum memadai akibat belum stabilnya jaringan internet yang ada di pedalaman dan perbatasan.
2. Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Pemilu masih terbatas untuk wilayah kecamatan dan belum menjangkau desa yang ada di Kabupaten Malinau.
3. Letak geografis antar kecamatan yang berjauhan menyebabkan pelaksanaan sosialisasi di daerah pedalaman dan perbatasan harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan yang ada.

Adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda (Pemilih Pemula)
2. Melakukan terobosan yaitu dengan memberi pendidikan politik melalui lewat media sosial facebook, tik tok dan juga Instagram.
3. Pendidikan Politik melalui event-event seperti pagelaran seni dan budaya, Festival dan jalan sehat.

c. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja **Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Politik** sebesar Rp. 19.972.103.618 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 19.999.996.000 atau capaian realisasi sebesar 99,86% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,56%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 27.892.382,00 atau sebesar 0,14%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan Peningkatan Kapasitas aparatur Daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan tentang Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesbangpol, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik dan Sosialisasi Pemilu serentak melalui pertemuan yang diadakan baik di Propinsi maupun Kabupaten serta zoom meeting dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk

melihat realisasi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan sub kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	Keterlibatan masyarakat dalam Pendidikan Politik	102,56 %	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik <i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik</i> Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	99,86

			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	
--	--	--	--	--

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Dari tabel diatas tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 1. Rakor Pengamanan dan Pemantauan Pemilu Tahun 2024



Gambar 2. Sosialisasi Undang-undang Pemilu Kepada Masyarakat

D. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	19.999.996.000	19.972.103.618	99,86%

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja untuk meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar Rp. 19.999.996.000 yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.972.103.618 atau tercapai 99,86%. Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Hibah bagi KPU, Bawaslu dan Parpol. Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	19.999.996.000	19.972.103.618	99,86
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta</i>	<i>19.999.996.000</i>	<i>19.972.103.618</i>	<i>99,86</i>

	<i>Pemantauan situasi Politik</i>			
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	199.996.000	193.199.000	96,60
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	13.500.000.000	13.478.904.618	99,84

Sumber : Sub Bagian Keuangan

3. Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”

Tabel 3.12
Pencapaian Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	70%	65,71%	93,87%

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik yaitu :

Hasil evaluasi /penilaian SAKIP tahun berjalan

- b. Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa pada sasaran ketiga **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, indikator kinerja yaitu **Nilai evaluasi SAKIP tahun berjalan** target kinerja yang ingin dicapai adalah 70 (tujuh puluh) dilihat dari laporan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Malinau. Pada tahun 2023 realisasi dari nilai evaluasi SAKIP tersebut tidak tercapai yakni 65,71% namun masih dalam kategori **B (Baik)**.

b. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun.....	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai evaluasi SAKIP tahun berjalan	Nilai	65,71	Tidak diperbandingkan	Tidak diperbandingkan	-	-

Sumber : Badan Kesbangpol Malinau

Dalam laporan hasil evaluasi AKIP Nomor : 700/35/Rev-SAKIP/EVASLAP tahun 2023 hasil evaluasi **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP, terdapat perubahan bobot komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi pada tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu adanya perubahan bobot komponen serta kriteria penilaian yang mana pada tahun sebelumnya penilaian menitikberatkan pada administrasi, namun pada tahun 2023 penilaian lebih menitikberatkan kepada implementasi. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari awal tahun hingga akhir tahun dalam kapasitasnya sebagai layanan internal OPD;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja berjenjang;
3. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan aktifitas perkantoran;
4. Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Ketidak mampuan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama untuk penyusunan dokumen Renstra dan LkjIP yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Sasaran pelaksanaan sosialisasi yang belum tepat atau dalam artian peserta sosialisasi pada umumnya bukan pengambil kebijakan, sehingga hasil sosialisasi yang diikuti tidak efektif;
3. Faktor ketidakmampuan belajar ASN yang sangat berpengaruh yaitu aparatur hanya mengenali peran dan posisinya saja dan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan organisasi secara keseluruhan termasuk perlunya ikut terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum terwujudnya tim SAKIP internal OPD yang solid.

Adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti rekomendasi tim SAKIP untuk meningkatkan nilai AKIP Kesbangpol melalui 3 indikator yang tertuang dalam LHE;
2. Sosialisasi penyusunan dokumen SAKIP bagi OPD;
3. Menerapkan manajemen kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Badan Kesbangpol Malinau;
4. Menciptakan budaya organisasi yang positif dengan berfokus pada skill dan kompetensi aparatur agar dapat bertumbuh dan berkembang.

c. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja **Nilai Evaluasi SAKIP** sebesar Rp. 4.646.117.343 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.987.571.727 atau capaian realisasi sebesar 99,06% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 93,87%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka terdapat efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 341.454.384 atau sebesar 0,93%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan Peningkatan Kapasitas aparatur Daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui pertemuan di lingkup intansi Pemerintah Daerah maupun lewat konsultasi dan koordinasi di Propinsi dan Pusat serta zoom meeting dari Kementrian yang berwenang.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan sub kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian SAKIP	Capaian Kinerja Program	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	65,71 %	93,87	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota <i>Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN <i>Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,06

				Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Dari tabel diatas tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja merupakan akumulasi keseluruhan penilaian yang ada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan hasil capaian kinerja program adalah capaian yang hanya berfokus pada program saja sehingga realisasi capaian juga seputar kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut sehingga tingkat capaiannya bisa lebih tinggi.

E. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	4.987.571.727	4.646.117.343	99,06%

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar Rp. 4.987.571.727 yang telah terealisasi sebesar Rp. 4.646.117.343 atau tercapai 99,06%. Anggaran tersebut merupakan Belanja Operasi dan untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.987.571.727	4.646.117.343	99,06%
	<i>Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	4.638.571.727	4.307.600.721	92,86
	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.638.571.727	4.307.600.721	92,86
	<i>Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	349.000.000,00	338.516.622,00	97,00
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65.000.000,00	60.369.400,00	92,88
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	55.000.000,00	54.971.000,00	99,95
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.000.000,00	57.074.400,00	98,40
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	171.000.000,00	166.101.822,00	97,14

Sumber : Sub Bagian Keuangan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarannya. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau tidak terlepas dari hambatan–hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan–hambatan dalam pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang sangat baik, dilihat dari persentase rata-rata pencapaian kinerja tujuan/sasaran sebesar **98,53%** dan persentase rata-rata pencapaian realisasi anggaran program/kegiatan dari 6 (enam) kegiatan dengan sebesar **97,40%** dengan jumlah Pagu **Rp.27.132.556.527,-** Realisasi Keuangan **Rp. 26.543.714.216,-**.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi SAKIP OPD terdapat beberapa catatan yang menjadi rekomendasi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional (refocusing) organisasi.
2. Memperbaiki dan menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :
 - a. Komponen perencanaan kinerja
 - b. Komponen pengukuran kinerja
 - c. Komponen pelaporan kinerja

d. Komponen evaluasi kinerja internal

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari inspektorat, langkah-langkah yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel matriks di bawah ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

KEPALA BADAN,

MULIYADI,S.H.,M.Si

Pembina TK.I IV/b

NIP. 19740525 200112 1 004

Rekomendasi hasil penilaian SAKIP OPD Kesbangpol dan Tindak Lanjut

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional (refocusing) organisasi.	Penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional (refocusing) organisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan Perda/Perbup
2. Komponen perencanaan kinerja	a. Dokumen Renstra telah di Reviu oleh Bappeda dan Organisasi b. Evaluasi Program Renstra tahun 2016-2021
3. Komponen pengukuran kinerja	a. Indikator kinerja eselon II, III dan Jabatan Fungsional tertuang dalam Pohon Kinerja b. Telah disusun standar operasional prosedur (SOP) SAKIP c. IKU Individu telah mengacu kepada IKU OPD
4. Komponen pelaporan kinerja	a. Telah dilakukan reviu sesuai ketentuan b. Dokumen dipublikasikan sesuai jadwal yang ditetapkan
5. Komponen evaluasi kinerja internal	a. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal b. Menggunakan aplikasi sebagai evaluasi akuntabilitas internal

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023
SESUAI SK KEPALA BADAN KESBANGPOL
NOMOR :02.S-KSBG/ I TAHUN 2024**

KETUA	:	KEPALA BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIS	:	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
ANGGOTA	:	1. KABID KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
		2. KABID POLDAGRI
		3. KABID BINA IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGASA
		4. KABID PENANGANAN KONFLIK DAN WASNAS
		5. PERENCANA AHLI MUDA
		6. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
		7. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
		8. PENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN
		9. BENDAHARA PENGELUARAN

KEPALA BADAN,

MULIYADI,S.H.,M.SI

Pembina TK.I IV/b

NIP. 19740525 200112 1 004